

---

**MENELISIK JEJAK PENDIDIKAN DI SULAWESI SELATAN:  
DARI SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL HINGGA SISTEM PENDIDIKAN  
MODERN**

*Oleh:*

**St. Junaeda, S.Ag., M.Pd., M.A.  
Fakultas Ilmu Sosial UNM Makassar**

**Abstract**

This paper describes the transformation of the education system in South Sulawesi, from the model tradisional to modern. The education system in South Sulawesi conceptual change as a result of the ongoing colonialism. The important question is how the process of transformation of the education system in South Sulawesi. This question can pull a conclusion, that the system changes from traditional to modern education is just a simple implication of an application of different interests. Far more important is the change in the education system that took place in South Sulawesi encourage the emergence of an awareness in understanding the entity's identity as a nation.

*Keywords: Traces of Education in South Sulawesi*

**A. Pendahuluan**

Sistem pendidikan menjadi salah satu pokok kajian penting dalam lintasan sejarah Indonesia. Sistem pendidikan dalam hal ini lebih menitikberatkan pada persoalan model yang digunakan serta dikembangkan dalam masyarakat. Keluaran dari proses pelaksanaan sistem pendidikan juga menjadi bagian yang terintegrasi dari siklus sistem pendidikan itu sendiri.

Di Sulawesi Selatan dan di beberapa daerah di belahan Indonesia yang lain, secara umum telah mengenal sistem pendidikan dalam konteks yang sangat umum. Sistem pendidikan, dalam hal ini hanya berkaitan dengan terjadinya sebuah proses belajar mengajar antara pihak pengajar dengan pihak yang diajar. Sistem pengajaran ini belum mengenal kurikulum, atau sistem penjurusan, apalagi berkaitan dengan keluaran (out put) bagi para anak didik ketika dinyatakan lulus untuk bagaimana dan dimana harus mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari tersebut. Sistem pendidikan semacam ini dalam skala model sistem pendidikan, akrab disebut sebagai sistem pendidikan tradisional.

Di Sulawesi Selatan, sistem pendidikan tradisional telah dijalankan sesuai dengan ritme pada masanya dan bergantung pada kebutuhan saat itu, tanpa mempertegas bagaimana mengatur atau mengelola kualitas serta hasil keluaran para anak didiknya. Artinya, pada prinsipnya, masyarakat Sulawesi Selatan hanya sekedar berpikir, bahwa mereka harus belajar tentang sebuah ilmu pengetahuan dan dengan ilmu tersebut, mereka akan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Mereka percaya, bahwa belajar merupakan sesuatu yang penting saat itu, tanpa harus bertanya ketika telah mempelajari ilmu pengetahuan tertentu itu mereka akan menjadi apa dan bekerja dimana. Dalam konteks ini, pertanyaan itu tidak menjadi sesuatu yang penting, bahkan tidak dipertanyakan, karena orientasi mereka adalah, bahwa ada nilai kemanfaatan yang "lebih" ketika mereka berguru kepada Kiyai atau Maha Guru. Dengan kata lain,

idealisme atau kesadaran kolektif yang terbangun saat itu adalah, bahwa mereka berusaha untuk menjadi orang baik dan mengerti. Inilah dasar dari pelaksanaan sistem pendidikan tradisional yang berlaku dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

Menjadi menarik ketika sistem pendidikan di Sulawesi Selatan telah mengalami pergeseran dari sistem tradisional menjadi sistem pendidikan modern. Kategori modern dalam konteks ini adalah adanya perubahan model, serta standart perjenjangan atau kurikulum yang diterapkan sesuai dengan tingkat pemahaman seseorang yang menjadi anak didik. Lebih dari itu orientasi dari pelaksanaan sistem pendidikan modern adalah menjawab dari pertanyaan yang pada periode sebelumnya tidak menjadi pertanyaan penting atau justru tidak ditanyakan. Perihal tentang apa yang dipelajari, untuk apa dipelajari dan setelah mengetahui atau lulus akan diaplikasikan dimana dan menjadi apa, merupakan orientasi penting dalam penerapan sistem pendidikan modern. Oleh karena itu, dalam hal ini, pertanyaan penting yang diajukan adalah bagaimana proses transformasi sistem pendidikan yang ada dalam masyarakat Sulawesi Selatan.

### **B. Mengenal Sistem Pendidikan Tradisional**

Sistem pendidikan di Sulawesi Selatan bergerak dari pemahamannya yang Sangay sederhana tentang pentingnya menimba ilmu dari seorang Kiyai atau Maha Guru. Inilah modal awal dalam kaitannya terbentuknya sebuah sistem atau pola pendidikan awal dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Islam, dalam kaitannya sebagai agama, ideologi, maupun sebagai kebudayaan, menjadi bagian penting dalam mendorong munculnya pola atau sistem pengajaran tradisional. Tingkat pemahaman awal masyarakat tentang Islam, pada prosesnya diartikulasikan dalam tingkatan yang sangat praktis, yakni disandingkan dengan pengetahuan lokalitas (baca: tradisi para Islam, *red.*), sehingga menjadi sebuah pengetahuan baru (pola singkretisme, *red.*). Pengetahuan inilah yang kemudian oleh sebagian orang yang memiliki kapasitas keilmuan lebih akhirnya ditulis dengan menggunakan daun lontar dan dituliskan dengan menggunakan aksara lokalitas mereka sendiri yang kemudian oleh masyarakat Sulawesi Selatan disebut sebagai Lontarak. Inilah yang kemudian menjadi sumber acuan dalam pola pengembangan sistem pendidikan tradisional pada periode awal. Berikutnya, ketika wacana dan pengetahuan tentang Islam semakin besar, masyarakat mulai bergeser untuk mencari sumber lain dalam sistem belajar mengajar. Sumber lain dalam hal ini hadala sebuah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, Ijma' dan Kiyas. Pentingnya serta rasa ingin tau yang mendalam terhadap sumber utama Agama Islam ini menjadikan sistem pengajaran tradisional terus berkembang dan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Ketika Agama Islam mulai dianut di Sulawesi Selatan,<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai sumber acuan pendidikan. Transfer ilmu pengetahuan pada umumnya dilakukan dengan pengajaran membaca Al'Qur'an, baik yang dilakukan di mesjid, mushallah, surau, maupun dengan mendatangi rumah guru mengaji. Selain pembelajaran dengan mengaji, juga dilakukan ceramah, pengajian, maupun dialog-dialog. Surau pertama di Sulawesi Selatan terdapat di Gowa. Murid-muridnya antara lain Syekh Yusuf, Datuk ri Panggentungan, dan *Lomo' ri Antang*.<sup>2</sup> Model pengajaran

<sup>1</sup> Mengenai penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, lihat. Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan* (Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), bekerja sama dengan Departemen Agama RI, 1976.

<sup>2</sup> Mengenai sistem pengajaran Islam di Sulawesi Selatan, lihat Mardanas Safwan, (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan* (Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981), hlm. 42.

yang bersumber dari agama Islam ini juga dijelaskan dan ditegaskan sebagai berikut:

Peladjaran jang diberikan dalam sekolah-sekolah agama, terutama di Soelawesi ini, sebagai soedah oemoem doeloe-doeloenya pengadjaran diberikan dalam langgar setjara hoofdelijk (seorang demi seorang) kepada moerid-moerid oleh kiaji-kiaji.<sup>3</sup>

Dari kutipan langsung ini dapat dijelaskan, bahwa pendidikan Agama Islam yang ada di Sulawesi Selatan, umumnya menggunakan Langgar atau mushollah sebagai tempat para pendidik mengajarkan ilmu pengetahuan (baca: Agama Islam, *red.*) kepada para anak didiknya. Sistem pengajaran yang diterapkan adalah sistem pengajaran tunggal, yakni para anak didik secara bergiliran atau satu persatu menghadap kepada pengajar yang umumnya disebut Kiyai untuk secara langsung mendapat pengajaran tentang Al-Qur'an. Sistem ini sangat efektif saat itu, karena Kiyai dapat secara langsung mengetahui kemampuan para santrinya secara mendalam. Lebih dari itu, sistem demikian lebih memudahkan para Kiyai untuk lebih mengenal lebih dalam terhadap karakter dari masing-masing santrinya.

Sistem atau pola pengajaran tunggal ini terjadi mengalir, tidak terdapat batasan waktu yang melingkupinya. Penentuan siapa yang dianggap telah selesai merupakan otoritas seorang Kiyai atau Maha Guru. Kiyai atau Maha Guru berhak menentukan kapanpun bagi seorang santri atau murid yang dianggapnya telah lulus dalam mempelajari ilmu tersebut. Dalam konteks ini, secara sederhana, sistem pengajaran ini dilakukan tanpa sebuah perjenjangan serta tidak mengenal sistem klasikal.<sup>4</sup>

### C. Pendidikan Masa Kolonial

Untuk pertama kalinya, masyarakat Sulawesi Selatan mengenal sistem pendidikan formal pada tahun 1779. Pihak yang mengenalkan sistem pendidikan ini adalah *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). VOC mendirikan sekolah yang terletak di Kota Makassar dengan jumlah murid 50 orang.<sup>5</sup> Ini merupakan satu-satunya sekolah formal yang dibuka selama masa VOC di Makassar, sehingga dapat dikatakan bahwa VOC selama berada di Sulawesi Selatan mengabaikan pengembangan di bidang pendidikan.

Perhatian pemerintah Hindia Belanda untuk memajukan pendidikan di Hindia Belanda tidak bisa dilepaskan dari kebijakan politik etis sebagai kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan di tanah Hindia Belanda. Awal lahirnya politik etis ini tidak terlepas dari kebijakan parlemen Belanda dan tarik-menarik kepentingan antar berbagai kelompok di dalam parlemen. Dalam hal ini, muncul protes atas kondisi rakyat di Hindia Belanda yang semakin memburuk sehingga muncul tuntutan dari kelompok konservatif untuk melakukan perbaikan nasib bagi rakyat di Hindia Belanda. Secara umum, pembukaan sekolah ini bertujuan untuk mengatasi

---

<sup>3</sup> A. St. D., *Modernisasi Dalam Tjara Mengoedjoedkan Pengadjaran Agama di Sulawessi* (Makassar: Neratja-Pergaulan [Majalah Tengah Bulanan Berdasar Islam], no. 2, tahun II, edisi 30 Juni 1939), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Terkait dengan sistem pembelajaran tradisional, lihat Mukhlis Paeni, dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Jakarta: CV. Dwi Jaya Karya, 1995), hlm. 119-123

<sup>5</sup> Tidak ada data pasti tentang nama dan jenis sekolah yang didirikan oleh VOC ini, hanya menyebutkan bahwa sekolah ini memiliki 50 orang siswa. Lihat Mukhlis P. dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995), hlm.126.

kebutuhan pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi beberapa kekurangan pegawai dalam birokrasi kolonial di tingkat bawah (lokal). Selain bertujuan untuk menghasilkan pegawai-pegawai pada Pemerintah Hindia Belanda, juga dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga-tenaga terampil yang selanjutnya diharapkan bisa menjadi pegawai pada perusahaan-perusahaan industri dan perdagangan swasta dimana pemerintah Hindia Belanda juga memiliki kepentingan.

Secara umum, pendidikan formal yang diperkenalkan oleh Pemerintah Belanda terbagi menjadi dua jenis sekolah. Pembagian tersebut didasarkan pada bahasa pengantar yang digunakan oleh sekolah masing-masing. Bahasa pengantar yang diberikan pada sekolah tersebut adalah Bahasa Belanda dan Bahasa Daerah. Perbedaan kedua bahasa pengantar ini didasarkan pada perbedaan warna kulit sebagai bentuk diskriminasi terhadap etnik tertentu. Hal ini nampak pada jenis-jenis sekolah yang dibuka dan untuk ras apa jenis sekolah-sekolah tersebut. Umumnya, sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Daerah diperuntukan bagi masyarakat pribumi, sedangkan sekolah yang menggunakan bahasa pengantar Bahasa Belanda diperuntukan bagi orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, orang-orang keturunan campuran Belanda, orang-orang keturunan campuran Eropa, dan perkecualian untuk sekolah khusus Suku Ambon, suku Minahasa, dan orang Timor yang beragama Katolik.

Kebijakan ini sebagai akibat dari munculnya dua aliran pemikiran yang berbeda mengenai jenis pendidikan dan untuk siapa jenis pendidikan itu. Kelompok pertama yang didukung oleh Snouck Hurgronje dan J.H. Abendanon lebih memilih untuk menyetujui ditingkatkannya pendidikan di Hindia Belanda dengan pendekatan yang sifatnya elite. Pendekatan elite ini akan melaksanakan sistem pendidikan gaya Eropa yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai Bahasa pengantar. Hal ini dimaksudkan selain untuk menciptakan elite baru yang tahu berterima kasih dan bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Belanda, juga untuk mengisi beberapa jabatan dalam pemerintahan yang sekaligus juga bisa menekan dan mengurangi anggaran belanja pemerintah.<sup>6</sup> Kelompok kedua adalah Idenburg dan Gubernur Jenderal Van Heutsz yang lebih cenderung memperkenalkan sekolah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Pikiran ini lebih didasarkan pada pertimbangan praktis dan bisa memberikan sumbangan langsung bagi kesejahteraan.<sup>7</sup>

Pada kenyataannya, kedua jenis pendidikan ini secara bersama-sama diterapkan ke dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Sekolah-sekolah yang menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar diantaranya adalah *Europeesche Lagere Scholen* (ELS). Sekolah ini dari awal menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. *Hollandsche Inlandsche Scholen* (HIS), sekolah ini secara bertahap menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Tiga tahun pertama menggunakan bahasa daerah, tetapi pada empat tahun terakhir menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sekolah khusus yang disediakan untuk serdadu KNIL di Ambon, Minahasa, dan Timor, *Meer Uitgebreide Lager Onderwijs* (MULO),

<sup>6</sup> Penjelasan lengkap tentang kondisi pendidikan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dapat dibaca pada tulisan Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1995); Djohan Makmur (Peny.), *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan* (Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993); Sumarsono Mestoko (dkk.), *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985); bandingkan juga dengan tulisan Setijadi, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

<sup>7</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 236.

dan *Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaren* (OSVIA). Kesemuanya itu menggunakan Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sementara yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar adalah Sekolah Desa Tiga Tahun (*Volksholen*) yang dibiayai oleh desa, Sekolah Lanjutan dua sampai dengan tiga tahun (*Vervolgscholen*), dan Sekolah Penghubung 5 tahun.

Untuk level pendidikan dasar, pada tahun 1891 pemerintah Kolonial Belanda mendirikan dua lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu adalah *Eerste Klass Inlandsche Scholen* (sekolah bumiputra angka satu) yang merupakan sekolah yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak priyayi dan anak dari keluarga berada. Sedangkan *Tweede Klass Inlandsche Scholen* (sekolah bumiputera angka dua) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi kebanyakan rakyat bumiputera.

Sekolah bumiputera Kelas Satu dibuka pada masing-masing ibukota keresidenan, masing-masing ibukota kewedanaan atau yang sederajat, dan pada kota-kota yang menjadi pusat perdagangan. Pembukaan sekolah ini diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, perdagangan dan perusahaan. Namun demikian, tidak ada peluang bagi siswa dari sekolah ini untuk pindah ke sekolah sistem Eropa yang paralel sebagai satu-satunya jalan untuk menuju pendidikan lanjutan. Hingga akhirnya, pada tahun 1914 sekolah ini berubah menjadi HIS.<sup>8</sup>

Untuk sekolah menengah, Pemerintah Belanda menyediakan sekolah MULO, *Algemeene Middelbare School* (AMS), *Hoogere Burger School* (HBS), dan sekolah-sekolah kejuruan seperti kejuruan untuk pertukangan, perdagangan, sekolah teknik, sekolah pertanian, dan sekolah kejuruan khusus wanita. Pada dasawarsa kedua abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda memikirkan untuk menyediakan pendidikan tinggi bagi golongan bumi putera. Selain membuka Sekolah Dokter Jawa (STOVIA), juga membuka *Nederlansche Indische Artsen School* (NIAS), sekolah Kedokteran di Jakarta dengan masa belajar 6 tahun, Pendidikan Tinggi Hukum, dan Pendidikan Tinggi Teknik yang kemudian berubah menjadi Institut Teknologi Bandung.

#### **D. Perbandingan Tingkat Pendidikan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara**

Kondisi pendidikan ini sangat berbeda dengan kondisi pada daerah-daerah yang berada di luar Jawa khususnya Sulawesi Selatan. Perbedaan ini menyangkut pada ketersediaan setiap jenjang pendidikan. Di Sulawesi Selatan, hanya menyediakan pendidikan tingkat dasar, lanjutan, dan kejuruan dengan jumlah yang sangat terbatas. Kondisi ini dapat dilihat pada tahun 1938 ketika itu diseluruh Hindia Belanda hanya ada delapan sekolah menengah, tujuh diantaranya berada di Jawa dan satu di Medan. Hanya ada satu sekolah dasar lanjutan (MULO) yang didirikan di Sulawesi Selatan dan satu sekolah untuk latihan para pejabat guru (OSVIA). Untuk sekolah menengah, tidak ada satupun yang dibuka di Sulawesi Selatan selama kurun waktu kekuasaan Pemerintah Belanda. Sebagai akibatnya, mereka harus ke Jawa jika ingin melanjutkan pendidikan.

Kedatangan Penginjil B.F. Matthes dan temannya L.W. Schmidt dan H.W. Bosman ke Makassar pada tahun 1848 yang bermaksud menyebarkan Agama Kristen, juga mendirikan lembaga pendidikan guru setelah setahun kedatangannya di Makassar.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 239.

<sup>9</sup> Matthes datang ke Makassar pada 1848 sebagai seorang peng-Injil. Dia tinggal di Makassar selama 23 tahun dan telah menjelajahi hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan. Selama tinggal di Makassar, Matthes telah menghasilkan banyak tulisan, diantaranya berhasil menterjemahkan Injil ke dalam bahasa Makassar dan Bugis. Selain menterjemahkan Injil, Matthes juga menulis buku yang berjudul *Makassaarsche en boeagineesche Woordenboek, Makassaarsch Chrestomathie* (satu jilid),

Lembaga pendidikan guru ini bernama *kweekschool* yang oleh orang Makassar disebut *sikola rajaya*.<sup>10</sup> Matthes, oleh orang Makassar dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dalam memelopori bagi kebangkitan pendidikan di Makassar. Penilaian ini didasarkan pada keterangan dan kesaksian masyarakat setempat.<sup>11</sup>

Usaha yang telah dirintis oleh Mathes kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memajukan pendidikan di Sulawesi Selatan. Sejak tahun 1905, Pemerintah Hindia Belanda mulai membuka beberapa sekolah, baik sekolah untuk kaum bangsawan maupun untuk masyarakat umum. Berturut-turut dibuka Sekolah Melayu di sebelah selatan Lapangan Karebosi pada tahun 1905, dan 1906 dibuka sekolah khusus anak Ambon *Hollandsche Ambonsche Scholen* (HAS) di Kampung Tabaringan, dan *Hollandsche Chinese Scholen* (HCS) pada tahun 1907. Setelah tahun 1905 hingga masuknya Pemerintah Jepang di Sulawesi Selatan tahun 1942, Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah-sekolah di daerah-daerah luar Makassar seperti di Bantaeng, pare-pare, Majene, Watampone dan pada beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan.<sup>12</sup>

Meskipun Pemerintah Hindia Belanda sudah membuka sejumlah sekolah pada hampir di semua daerah di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan masih saja menduduki ranking yang sangat rendah untuk tingkat melek hurufnya di seluruh Hindia Belanda. Hal ini tidak saja terjadi jika dibandingkan dengan seluruh wilayah di Hindia Belanda tetapi lebih jauh lagi ketinggalan jika harus dibandingkan dengan Keresidenan Manado, yang kemudian masuk dalam wilayah Sulawesi Utara. Meskipun jumlah penduduk Keresidenan Manado hampir sepuluh kali lebih sedikit dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan, namun tingkat kemampuan membaca dan menulis dalam Bahasa Belanda dua kali lebih banyak dibanding dengan seluruh jumlah penduduk Sulawesi Selatan dan Tenggara.<sup>13</sup>

Rasio kemampuan membaca dan menulis penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 1920 sampai tahun 1930 adalah 1:79. Pada waktu yang bersamaan, di Manado memiliki perbandingan 1:16 dan di Hindia Belanda 1:40. Sementara pada tahun 1936 sampai tahun 1937 perbandingan untuk Sulawesi Selatan adalah 1:55, untuk Manado 1:19 dan untuk Hindia Belanda 1:34. Perbandingan ini mencerminkan betapa rendahnya kemampuan membaca dan menulis orang-orang Sulawesi Selatan jika dibandingkan dengan angka rata-rata di seluruh Hindia Belanda.<sup>14</sup>

### **E. Pendidikan di Bawah Otoritas Negara Indonesia Timur (NIT)**

Kondisi yang tercipta selama masa Pemerintahan Hindia Belanda tidak jauh berbeda dengan masa Pemerintahan Militer Jepang. Bidang pendidikan tidak menjadi prioritas bagi kebijakan pemerintah militer Jepang, sehingga tidak terdapat

---

*Boegineesche Chrestomethie* (tiga jilid), dan *Over De Ada's Of Gewoontwn der Makkassaren en Boegineezen* (tanpa tahun dan penerbit). Lihat Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1985), hlm. 7-12.

<sup>10</sup> Istilah *sikola rajaya* berasal dari bahasa Makassar yang artinya Sekolah yang khusus diperuntukkan bagi kaum bangsawan.

<sup>11</sup> Tulisan yang khusus membahas tentang pendidikan di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tulisan Syarkawi, *Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876-1942*, (Jogjakarta: Tesis S2 UGM, tidak diterbitkan, 1997).

<sup>12</sup> Sejak tahun 1905-1942, jumlah sekolah di Makassar terdapat 34 buah. Selengkapnya lihat Mukhlis P. dkk, *op.cit.*, hlm. 130.

<sup>13</sup> Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Grafiti, 1989), hlm.68.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

perkembangan yang cukup signifikan. Masa penjajahan Jepang sangat singkat sehingga tidak ada perubahan yang sangat drastis dalam hal pendidikan. Kebijakan Pemerintah Jepang lebih cenderung diarahkan pada misi untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya yang sedang dihadapi.

Ketika masa kekuasaan Pemerintah Jepang berakhir di Indonesia, segera diumumkan proklamasi kemerdekaan. Namun, khusus untuk Provinsi Sulawesi yang saat itu dijabat oleh Gubernur Ratulangi, belum bisa melaksanakan administrasi pemerintahan secara normal. Awal tahun 1946, terbentuklah sebuah negara federal pertama di Indonesia yang kemudian akrab disebut Negara Indonesia Timur (NIT), dan menjadikan Makassar sebagai ibukotanya.

Kondisi pendidikan di Sulawesi Selatan dan Tenggara hingga masa Pemerintahan NIT masih tetap terbelakang dibanding daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Meskipun pemerintah NIT telah mengupayakan untuk memberantas buta huruf (latin) namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan.<sup>15</sup> Salah satu bentuk riil dari upaya presiden NIT, Soekawati untuk memberantas buta huruf latin adalah dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang khusus bertugas untuk memberantas buta huruf tersebut. Kepanitiaan tersebut dinamai Panitia Agoeng Pemberantasan *Boeta Hoeroef*.<sup>16</sup> Atas pembentukan panitia ini, Presiden Soekawati memberikan tanggungjawab sepenuhnya untuk segera membuka kelas-kelas. Wilayah pertama yang menjadi target pemberantasan buta huruf ini adalah Sulawesi Selatan kemudian menyusul daerah lain. Untuk Sulawesi Selatan, dimulai dari Makassar kemudian menyusul Gowa yang akan dibuka pada 2 juni 1948.<sup>17</sup>

Ada banyak faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Sulawesi Selatan. Salah satunya adalah ketersediaan guru profesional yang sangat minim. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendukung juga yang sangat terbatas. Kondisi ini digambarkan pada harian Indonesia Timur sebagai berikut:

Dari itoe disini saja mengoesahakan mengoeraikan hal-hal jang saja rasa mendjadi sebab-sebab yang njata menghalangi kemadjoean-kemadjoean dipergoeroean rendah terseboet.

1. Pada kebanyakan sekolah, kadang-kadang seorang goeroe haroes menghadapi doea atau tiga kelas.
2. Diloear Kota Makassar, kita dapati hampir seloeroeh Sekolah-sekolah Desa memakai tenaga-tenaga goeroe magang (keloearan kelas 5 atau 6) yang djoemlahnya lebih banyak dari goeroe-goeroe jang berdiploma.
3. Moerid-moerid dari tiap-tiap kelas (teroetama kelas I) kadang-kadang sesoedah diparalel, masih lagi meningkat bilangan 100 orang, sehingga mereka haroes berdesak-desak, dan setengahnja terpaksa poela berdiri sadja, karena bangkoe tidak mentjoekoepi.
4. Kebanjakan kelas hanya mendapat pengadjaran tiga, doea atau kadang hanya satoe sadja dalam sehari, karena haroes berganti masoek dengan lain-lain kelas.
5. Beberapa sekolah haroes mengatoer kelasnja sehari masoek sehari poela tidak, dengan mendapat peladjaran sebagai pada peraturan dalam nomor 4 di atas

<sup>15</sup> Selengkapnya dapat dilihat pada Pidato P. J. M. Tjokorde Gde Rake Soekowati dengan judul: "Menyamboet Kampanje Pembrantasan Boeta Hoeroef", dalam *Indonesia Timur*, 5 Juni 1948.

<sup>16</sup> M. Sjafa'I, "Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT", dalam *Indonesia Timoer*, 27 Mei 1948.

<sup>17</sup> M. Sjafa'I, "Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT", dalam *Indonesia Timoer*, 27 Mei 1948.

6. Karena soedah terlaloe banjak moerid dalam seboeah kelas, maka kadang-kadang seorang moerid hanja mendapat satoe kali giliran membatja atau menoeelis dalam seminggoe, sedang bagi moerid yang dikena peratoeran sebagaimana dalam nomor lima diatas beloem tentu akan mendapat giliran sekali dalam seboelan.<sup>18</sup>

Dari data statistik yang diperoleh, tingkat buta huruf di wilayah NIT pada tahu 1948 masih mencapai 48%.<sup>19</sup> Dari seluruh wilayah dalam NIT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Pulau Timor yang memiliki tingkat buta huruf paling tinggi yaitu 90%. Menyusul Flores, Sumba, dan Maluku Utara 80%. Sumbawa 75%, Lombok 40%, Sulawesi Utara, 25%, dan Bali 10%. Sedangkan yang cukup rendah adalah Sangir-Talau 8%, Maluku Selatan 5%, dan Minahasa 4%.<sup>20</sup>

Kondisi-kondisi yang tercipta di Sulawesi Selatan seperti yang dijelaskan di atas kemudian menjadi perhatian Nadjamoeddin dan kawan-kawannya. Memajukan pendidikan bagi bumiputera menjadi salah satu agenda penting Nadjamoeddin dalam rangka menyebarkan ide-ide nasionalisme yang selanjutnya diharapkan dapat membangun kesadaran berbangsa di Sulawesi Selatan. Bagaimana usaha Nadjamoeddin untuk memajukan pendidikan bumiputera di Sulawesi Selatan.

## F. Kesimpulan

Sistem pendidikan yang berlangsung di Sulawesi Selatan mengalami perubahan dalam skala konseptual, yakni dari tradisional menjadi modern. Perubahan sistem pendidikan ini tentunya mempengaruhi pola pengajaran, orientasi serta cara pandang dalam melihat kepentingan terkait dengan pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan tradisional di Sulawesi Selatan pada prinsipnya terjadi berdasar pada tingkat kebutuhan lokal dalam kaitannya tentang pentingnya pengetahuan tentang Agama Islam. Pada tahap ini tidak terdapat sebuah aturan atau sekaligus upaya pelebagaan sebuah sistem pendidikan secara formal. Secara umum, pengelolaan dilakukan secara informal.

Kolonialisme memberikan sumbangsih bagi proses pelebagaan sistem pendidikan yang ada di Sulawesi Selatan. Tingkat kebutuhan terhadap luaran peserta didik menjadikan kebutuhan penting terhadap disiplin ilmu tertentu, yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi pekerja profesional pada bidangnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pihak Kolonial. Pada konteks ini, pendidikan tidak menjadi sesuatu yang umum, melainkan secara spesifik dikelola oleh otoritas tinggi yakni negara. Ketika otoritas diberlakukan terhadap sistem pengelolaan pendidikan telah berubah, tentunya sangat berkaitan dengan kepentingan yang menyertainya. Semangat pengembangan sistem pendidikan yang terukur, tentunya sebagai bagian dari proses penjarangan kualitas personal dalam mengetahui atau memahami ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Pada proses berikutnya, sistem pendidikan mulai dijalankan sangat ketat dengan berbagai tata aturan yang melingkupinya. Tata aturan ini tidak lain adalah untuk

---

<sup>18</sup> B. S. Baranti, "Pergoeroean Rendah Indonesia Di Soelawesi Selatan Mengetjewakan", dalam *Indonesia Timur*, 11 Mei 1948.

<sup>19</sup> Jumlah 48% ini didasarkan pada hampir semua klasifikasi umur yaitu klasifikasi umur antara usia yang kurang dari 10 tahun dan lebih dari 40 tahun. Menurut kebiasaan pada negara-negara luar (internasional), rentang usia yang masuk buta huruf adalah antara usia 10 tahun hingga 40 tahun.

<sup>20</sup> "Pemilihan dan Pemberantasan Buta Buta Huruf", dalam *Panji Negara*, no. 4, 15 Juni 1949, hlm. 4-5.



membedakan secara berjenjang bagi identitas kebangsaan seseorang, apakah ia bumiputera, Timur Asing, atau Eropa tulen. Ketika proses ini berjalan, maka semangat yang berkembang dalam masyarakat dalam memaknai pendidikan juga telah mengalami pergeseran. Pendidikan tidak hanya sekedar menjadi bagian penting bagi seseorang untuk mengetahui tentang disiplin ilmu tertentu dan dapat bekerja sesuai bidangnya secara profesional, akan tetapi pemahaman masyarakat Bumiputera khususnya, telah bergeser pada persoalan yang lebih prinsip, yakni pengetahuan atau ilmu pengetahuan menjadi cahaya terang bagi pribadi dan masyarakat Sulawesi Selatan untuk memahami dirinya sebagai pribadi sekaligus sebagai entitas kebangsaan yang tidak terpisahkan dengan rakyat bumiputera lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi pintu pembuka bagi terbentuknya sebuah pemahaman yang sangat besar tentang bagaimana mendudukkan sebuah pemahaman tentang sebuah konsep dasar kecintaan terhadap tanah tumpah dara (baca: identitas lokalitas atau kedaerahan, *red.*). Konsep dasar tentang kecintaan terhadap tumpah darah ini semakin berkembang dan berakumulasi terhadap pemahaman yang lebih besar yakni pemahaman tentang identitas diri sebagai sebuah bangsa, dalam istilah yang sederhana disebut sebagai nasionalisme.

#### DAFTAR PUSTAKA

- “Pemilihan dan Pemberantasan Buta Buta Huruf”, dalam *Panji Negara*, no. 4, 15 Juni 1949
- A. St. D., *Modernisasi Dalam Tjara Mengoedjoedkan Pengadjaran Agama di Sulawessi*, Makassar: Neratja-Pergaulan [Majalah Tengah Bulanan Berdasar Islam], no. 2, tahun II, edisi 30 Juni 1939.
- B. S. Baranti, “Pergoeroean Rendah Indonesia Di Soelawesi Selatan Mengetjewakan”, dalam *Indonesia Timur*, 11 Mei 1948.
- Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar Dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafiti, 1989.
- Djohan Makmur (Peny.), *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: DEPDIKBUD Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- M. Sjafé’I, ”Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT”, dalam *Indonesia Timoer*, 27 Mei 1948.
- M. Sjafé’I, ”Oesaha Pemberantasan Boeta Hoeroef di Dalam NIT”, dalam *Indonesia Timoer*, 27 Mei 1948.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Mardanas Safwan, (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Selatan*, Ujungpandang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan dokumnetasi Kebudayaan Daerah, 1980/1981.
- Mattulada, *Islam di Sulawesi Selatan*, Jakarta: Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEKNAS-LIPI), bekerja sama dengan Departemen Agama RI, 1976.

- Mukhlis P. dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.
- Mukhlis Paeni, dkk., *Sejarah Kebudayaan Sulawesi*, Jakarta: CV. Dwi Jaya Karya, 1995.
- Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- P. J. M. Tjokorde Gde Rake Soekowati dengan judul: "Menyamboet Kampanje Pembrantasan Boeta Hoeroef", dalam *Indonesia Timur*, 5 Juni 1948.
- Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1985.
- Setijadi, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Sumarsono Mestoko (dkk.), *Pendidikan di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Syarkawi, *Perkembangan Pendidikan Kolonial di Makassar 1876-1942*, Jogjakarta: Tesis S2 UGM, tidak diterbitkan, 1997.